
PEMBERDAYAAN KOMITE MADRASAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN**Mariani^{1*}, Zaitun², Sohiron³***^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*Email: marianimery71@gmail.com

Abstract

If expert human resources are accessible, Madrasah-Based Management can be implemented effectively and efficiently. Madrasah-Based Management (MBM) cannot be implemented without the formation of the madrasah committee, an institution. A madrasah committee has been established by Madrasah Ibtidaiyah (MI) in Bathin Solapan District to assist the madrasah head in their work. The purpose of this study is to enable madrasah committees to apply madrasah-based management in order to raise the standard of instruction in MI's Bathin Solapan District. This study employs a descriptive methodology. Methods of observation, documenting, and interviewing are the data collection strategies employed. The Madrasah MI Committee in Bathin Solapan Bangkalis District has fulfilled its roles as an advisory agency, supporting agency, and other related roles, according to the findings of the research. One way to address this issue is for the Madrasah Committee to put together a team made up of committee members and instructional personnel to assess the madrasah's performance and create a plan of action for improvement.

Keywords: *Madrasah-Based Management, Role of Madrasah Committees, Quality of Education*

Abstrak

implementasi Manajemen Berbasis Madrasah akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Komite madrasah adalah suatu lembaga yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Bathin Solapan telah membentuk komite madrasah sebagai mitra kerja kepala madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan komite madrasah dalam pelaksanaan manajemen berbasis madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yakni metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Komite Madrasah MI Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis telah menjalankan perannya sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), pendukung (supporting agency), pengontrol (controlling agency) dan peran Komite Madrasah sebagai Mediator dengan baik. Pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di MI Kecamatan Bathin Solapan dianggap sudah cukup baik. Komite Madrasah sudah cukup berperan di Madrasah, namun belum optimal. Hal ini dikarenakan peran madrasah tersebut hanya memenuhi 6 dari 8 Standar Mutu Pendidikan. Upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hal ini adalah Komite Madrasah dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota komite dan tenaga pendidik untuk mengevaluasi kinerja madrasah dan merumuskan rencana aksi perbaikan.

Kata Kunci: *Manajemen Berbasis Madrasah, Peran Komite Madrasah, Mutu Pendidikan*

PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi di bidang pendidikan yang ditandai dengan dimulainya pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Manajemen berbasis madrasah merupakan konsekuensi dari perubahan pada manajemen negara atau pemerintahan, yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah (Hamid, 2013). Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan perubahan pada manajemen Pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada madrasah dengan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pendidikan (Ansori, 2016).

Keberhasilan program-program madrasah dalam konteks Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) didukung oleh kinerja team yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di madrasah. Komite Madrasah dibentuk sebagai bagian dari penerapan MBM yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Peran komite Sekolah dalam kaitannya dengan peningkatan mutu layanan pendidikan adalah sebagai badan *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah) (Ismanto, 2022).

Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan madrasah, dana yang cukup agar madrasah mampu untuk menggaji tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi. Perangkat terpenting dalam pengelolaan MBM adalah rencana madrasah untuk jangka waktu tertentu, yang disusun oleh kepala madrasah sendiri bersama komite madrasah tentang visi dan misi madrasah, tujuan madrasah, prioritas-prioritas yang akan dicapai, serta strategi-strategi untuk mencapainya.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XV Pasal 56 Ayat 3 menjelaskan bahwa komite madrasah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan bagi peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Dirjen Depag RI, 2005).

Keberadaan komite madrasah terutama dalam kaitannya dengan masalah relevansi pendidikan yang akan diwujudkan dalam MBM, agar apa yang dilaksanakan di madrasah sejalan dengan perkembangan masyarakat (Depag RI, 2003). Di sisi lain, madrasah adalah salah satu unit penting yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan komite madrasah merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Dalam konteks Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), komite madrasah merupakan sesuatu yang sangat penting, karena melalui komite ini dapat dibangun sinergi antara pengelola madrasah, masyarakat, dan pemerintah, sehingga terbentuk komitmen dan tanggungjawab bersama dalam menyelenggarakan madrasah. Oleh karena itu, optimalisasi komite madrasah sesungguhnya merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam rangka dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan madrasah⁶. Keberadaan komite madrasah merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi manajemen berbasis Madrasah (MBM) yang efektif dan efisien.

Komite Madrasah memegang peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah. Komite Madrasah harus berperan aktif dalam membantu madrasah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan,

Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan dan Standar Penilaian Pendidikan. 1 SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, SNP harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan Pendidikan (Ramli, 2021).

Manajemen berbasis madrasah memiliki beberapa karakteristik yang perlu dipahami oleh madrasah yang akan menerapkan dan melaksanakannya. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Dirjen Dikdasemen, Depdiknas diungkapkan beberapa indikator yang menjadi karakteristik dari konsep MBS sekaligus merefleksikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yakni lingkungan disekolah yang aman dan tertib, sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, peran kepala sekolah yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyeraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia, adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainnya, termasuk siswa) untuk berprestasi, Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan, adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan dan atau perbaikan mutu serta Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua siswa dan masyarakat lainnya (Sanjani, 2018).

Masalah yang terjadi pada Komite Madrasah saat ini adalah disfungsi Komite Madrasah. Peranan Komite Madrasah sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan semestinya, dimana komite madrasah hanya terlihat saat diadakannya acara-acara pada madrasah sehingga terkesan hanya sebagai tamu undangan yang menghadiri acara yang diadakan oleh pihak satuan pendidikan. Hal ini menjadi dasar pentingnya melakukan tinjauan ulang terkait peran komite madrasah dan melakukan pemberdayaan komite madrasah sejalan dengan pelaksanaan manajemen berbasis madrasah untuk meningkatkan kualitas madrasah. Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Bathin Solapan telah membentuk komite madrasah sebagai mitra kerja kepala madrasah. Namun, untuk mendukung terlaksananya penerapan manajemen berbasis madrasah, maka perlu dilakukan pemberdayaan komite madrasah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini difokuskan pada pengelolaan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis. Madrasah Ibtidaiyah yang diteliti berjumlah 3 MI yang terdapat di Kecamatan Bathin Solapan, yaitu MI Darul Ihsan, MI Ihya Ulumuddib dan MI Lancang Kuning. Adapun sumber data penelitian yakni komite madrasah dan kepala madrasah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data kualitatif yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari empat aktivitas, diantaranya: Pengumpulan data, Reduksi data, Display data, dan Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Data yang diperoleh dari penelitian yang masih bersifat kompleks dan rumit direduksi, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuang hal-hal yang tidak perlu. Data hasil penelitian ini yang harus direduksi meliputi data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang berisi tentang pengelolaan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis. Data hasil reduksi disajikan atau di display ke dalam bentuk naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komite madrasah dibentuk sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan yang didasarkan atas Kepmendiknas No. 044/U/2002. Komite Madrasah

berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan Pendidikan, pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan Pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator bagi madrasah memiliki arti bahwa komite madrasah dipandang sebagai mitra kerja kepala madrasah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan madrasah. Melalui komite madrasah masyarakat dapat ikut serta dalam merumuskan dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh madrasah seperti kebijakan, program, dan kegiatan madrasah.

Komite Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bathin Solapan sebagai pemberi pertimbangan sudah melakukannya dengan baik. Peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) yakni komite madrasah selalu aktif dalam memberikan saran dan masukan terhadap RAPBS, memberikan masukan terhadap program madrasah, memberi saran dan masukan terhadap penyusunan kurikulum dan pembelajaran masukan terhadap sarana dan prasarana di madrasah. Komite madrasah juga berupaya untuk selalu memberikan saran terhadap kriteria tenaga kependidikan di madrasah.

Peran komite sebagai pendukung (*supporting agency*), kebanyakan komite madrasah mengatakan mereka selalu mendukung masyarakat dalam meningkatkan pendidikan di madrasah. Mereka juga menyatakan sering ikut serta mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana madrasah, memberikan masukan dan saran terhadap anggaran yang ada dan komite madrasah sering memberikan tanggapan dan pendapat terhadap kurangnya guru di madrasah serta mendukung penggalangan dana masyarakat dalam pendidikan di madrasah.

Peran komite madrasah sebagai pengontrol (*controlling agency*) yakni madrasah sering ikut serta dalam mengontrol proses perencanaan pendidikan di madrasah, memantau organisasi dan ekstrakurikuler madrasah dan komite madrasah juga sering mengontrol pelayanan yang ada di madrasah. Mereka juga menyatakan bahwa mereka ikut serta dalam mengontrol proses pembelajaran dan ujian di madrasah dan proses pengambilan keputusan di madrasah.

Peran Komite Madrasah sebagai Mediator memperoleh pernyataan bahwa komite madrasah sering ikut serta dalam mensosialisasikan kebijakan dan program madrasah kepada masyarakat, menjalin kerja sama dengan lembaga yang terkait untuk meningkatkan kualitas madrasah, menjadi penghubung antara komite madrasah dengan masyarakat, komite madrasah dengan madrasah, dan komite madrasah dengan dewan Pendidikan serta mensosialisasikan kebijakan dan program madrasah kepada masyarakat dan menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program madrasah.

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Dirjen Dikdasemen, Depdiknas diungkapkan beberapa indikator yang menjadi karakteristik dari konsep MBS sekaligus merefleksikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak antara lain lingkungan disekolah yang aman dan tertib, sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, peran kepala sekolah yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyeraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia, adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainnya, termasuk siswa) untuk berprestasi, adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan, adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek

akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan dan atau perbaikan mutu, serta adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua siswa dan masyarakat lainnya. 116

Pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di MI Kecamatan Bathin Solapan dianggap sudah cukup baik. Pelaksanaan manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan memang masih didominasi dengan peran kepala madrasah, namun hal tersebut berarti kepala madrasah telah melakukan perannya sebagai manajer di madrasah tersebut dengan baik. Kepala madrasah harus bisa membuat langkah strategis dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di madrasah, Penerapan MBS pada masing-masing MI ditekankan pada penerapan kerja sama semua komponen yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut. Tanpa kerja sama yang baik maka kualitas dan mutu pendidikan tidak akan tercapai.

Mewujudkan program peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdapat kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah di Indonesia Pasal 3 PP. 19/2005 tentang SNP. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan komite dan kepala madrasah di Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Bathin Solapan dapat diketahui bahwa pemberdayaan peran Komite madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MI di Kecamatan Bathin Solapan telah terlaksana mulai dari pembentukan Komite madrasah dan upaya pelaksanaan peran komite madrasah dalam memenuhi 8 Standar Mutu Pendidikan. Komite madrasah sudah cukup berperan di Madrasah, namun belum optimal. Hal ini dikarenakan peran madrasah tersebut hanya memenuhi 6 dari 8 Standar Mutu Pendidikan. Komite madrasah di MI di Kecamatan Bathin Solapan belum memenuhi standar penilaian dan pengelolaan dalam menjalankan tugasnya.

Upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hal ini adalah Komite madrasah dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota komite dan tenaga pendidik untuk mengevaluasi kinerja madrasah dan merumuskan rencana aksi perbaikan. Komite madrasah dapat menuntut madrasah untuk menggunakan sistem penilaian yang jelas dan transparan. Sebagai contoh, sistem penilaian dapat mencakup penilaian kinerja guru, penilaian kinerja siswa, dan penilaian kinerja madrasah secara keseluruhan, Komite madrasah dapat mengikuti pelatihan komite untuk meningkatkan kualitas kerja komite di madrasah, Komite madrasah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam mengawasi proses pembelajaran dan pengelolaan administrasi madrasah, dan meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran dan pengelolaan madrasah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul "Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Di MI Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis" maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), sebagai pendukung (*supporting agency*), sebagai pengontrol (*controlling agency*) dan sebagai mediator sudah dilaksanakan dengan baik; 2) Pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di MI Kecamatan Bathin Solapan dianggap sudah cukup baik. Pelaksanaan manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan memang masih didominasi dengan peran kepala madrasah, namun hal tersebut berarti kepala madrasah telah melakukan perannya sebagai manajer di madrasah tersebut dengan baik. Kepala madrasah harus bisa membuat langkah strategis dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di madrasah, Penerapan MBS pada

masing- masing MI ditekankan pada penerapan kerja sama semua komponen yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut; dan 3) Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa pemberdayaan peran komite madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MI di Kecamatan Bathin Solapan telah terlaksana mulai dari pembentukan komite madrasah dan upaya pelaksanaan peran Komite madrasah dalam memenuhi 8 Standar Mutu Pendidikan. Komite madrasah sudah cukup berperan di Madrasah, namun belum optimal. Hal ini dikarenakan peran madrasah tersebut hanya memenuhi 6 dari 8 Standar Mutu Pendidikan. Komite madrasah di MI di Kecamatan Bathin Solapan belum memenuhi standar penilaian dan pengelolaan dalam menjalankan tugasnya. Upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hal ini adalah Komite madrasah dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota komite dan tenaga pendidik untuk mengevaluasi kinerja madrasah dan merumuskan rencana aksi perbaikan. Komite madrasah dapat menuntut madrasah untuk menggunakan sistem penilaian yang jelas dan transparan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ansori AH, Pentingnya Manajemen Berbasis Madrasah/Madrasah dalam Kepemimpinan Madrasah/Madrasah Efektif, *Jurnal Tarbawi*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 27.
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, 2005, hlm. 24.
- Departemen Agama RI, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, Jakarta, 2003, hlm. 5
- Hamid, Manajemen Berbasis Madrasah, *Al-Khawarizmi*, Vol. 1, 2013, hlm. 87.
- Ismanto' H, Murtafi' ah NH, Lestari S, Implementasi Peran Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Bakauheni Lampung Selatan, *Unisan Jurnal*, Vol. 01 No. 01, 2022, hlm. 491-501.
- Nasyirwan, Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan oleh Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Lulusan, *Manajer Pendidikan*, Vol. 9, Nomor 6, 2015, hlm. 724-736.
- Ramli, Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol 3 No.1, 2021, hlm. 147-163.
- Sanjani MA, Implementasi Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah Tsanawiyah Swasta TPITanjung Putus, *Jurnal IANSIRU PAI*, Vo. 3 No. 1, Januari-Juni 2018. Hlm. 103-113.